LAPORAN TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL REVIU APIP TERHADAP RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERTANIAN

NO.	REKOMENDASI PENYEMPURNAAN	TINDAK LANJUT		BAB	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
1.	Kepala Dinas Pertanian agar memerintahkan Tim Penyusun Perubahan Renja Dinas Pertanian Tahun 2025 untuk melakukan perbaikan Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 terkait penulisan nomor tabel pada Bab II yaitu pada Subbab 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun Berkenaan pada : a. Nomor Tabel 2.1.1 seharusnya Tabel 2.1 b. Nomor Tabel 2.1.2 seharusnya Tabel 2.2 c. Nomor Tabel 2.1.3 seharusnya Tabel 2.3 d. Nomor Tabel 2.1.4 seharusnya Tabel 2.4 e. Nomor Tabel 2.1.5 seharusnya Tabel 2.5 f. Nomor Tabel 2.1.6 seharusnya Tabel 2.6 g. Nomor Tabel 2.1.7 seharusnya Tabel 2.7 h. Nomor Tabel 2.1.8 seharusnya Tabel 2.8 i. Nomor Tabel 2.1.9 seharusnya Tabel 2.9 j. Nomor Tabel 2.1.10 seharusnya Tabel 2.10 k. Nomor Tabel 2.2.1 seharusnya Tabel 2.11 l. Nomor Tabel 2.2.1.1 seharusnya Tabel 2.12 m. Nomor Tabel 2.2.1.2 seharusnya Tabel 2.13 n. Nomor Tabel 2.2.2.1 seharusnya Tabel 2.14 o. Nomor Tabel 2.2.2.2 seharusnya Tabel 2.15 p. Nomor Tabel 2.2.2.2.1 seharusnya Tabel 2.16 q. Nomor Tabel 2.2.4 seharusnya Tabel 2.17 r. Nomor Tabel 2.2.5 seharusnya Tabel 2.18 s. Nomor Tabel 2.3.1 seharusnya Tabel 2.19	✓		Bab II	Sudah ditindaklanjuti



Nganjuk, 13 Juni 2025
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Nganjuk

Ida Shobihatin, AP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197501161994122001

LAPORAN TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL REVIU APIP TERHADAP RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERTANIAN

NO.	REKOMENDASI PENYEMPURNAAN	TINDAK LANJUT		BAB	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
1.	Kepala Dinas Pertanian agar memerintahkan Tim Penyusun Perubahan Renja Dinas Pertanian Tahun 2025 untuk melakukan perbaikan Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 terkait penulisan nomor tabel pada Bab II yaitu pada Subbab 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun Berkenaan pada : a. Nomor Tabel 2.1.1 seharusnya Tabel 2.1 b. Nomor Tabel 2.1.2 seharusnya Tabel 2.2 c. Nomor Tabel 2.1.3 seharusnya Tabel 2.3 d. Nomor Tabel 2.1.4 seharusnya Tabel 2.4 e. Nomor Tabel 2.1.5 seharusnya Tabel 2.5 f. Nomor Tabel 2.1.6 seharusnya Tabel 2.6 g. Nomor Tabel 2.1.7 seharusnya Tabel 2.7 h. Nomor Tabel 2.1.8 seharusnya Tabel 2.8 i. Nomor Tabel 2.1.9 seharusnya Tabel 2.9 j. Nomor Tabel 2.1.10 seharusnya Tabel 2.10 k. Nomor Tabel 2.2.1 seharusnya Tabel 2.11 l. Nomor Tabel 2.2.1.1 seharusnya Tabel 2.12 m. Nomor Tabel 2.2.1.2 seharusnya Tabel 2.13 n. Nomor Tabel 2.2.2.1 seharusnya Tabel 2.14 o. Nomor Tabel 2.2.2.2 seharusnya Tabel 2.15 p. Nomor Tabel 2.2.2.2.1 seharusnya Tabel 2.16 q. Nomor Tabel 2.2.4 seharusnya Tabel 2.17 r. Nomor Tabel 2.2.5 seharusnya Tabel 2.18 s. Nomor Tabel 2.3.1 seharusnya Tabel 2.19	✓		Bab II	Sudah ditindaklanjuti

Nganjuk, 13 Juni 2025
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Nganjuk

Ida Shobihatin, AP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197501161994122001

PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERTANIAN
Jl. Anjuk Ladang No. 37 Loceret Nganjuk
E-mail : pertanian@nganjukkab.go.id

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertaian Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 ini adalah dokumen rencana operasional tahunan pembangunan sub sektor Pertanian. Untuk selanjutnya dokumen Perubahan Renja ini akan menjadi acuan pelaksanaan pembangunan bagi segenap pemangku kepentingan pembangunan Pertanian di Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk selama Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini memuat substansi pokok tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (2024), review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025, penelaahan usulan program/kegiatan masyarakat, serta memuat rumusan pokok program/kegiatan Tahun 2025.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 ini diharapkan seluruh proses pelaksanaan kebijakan pembangunan sub sektor Pertanian Kabupaten Nganjuk akan menjadi lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna, serta berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Pertanian secara berkesinambungan.

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah menerjemahkan secara operasional perencanaan jangka menengah daerah dan perencanaan tahunan daerah ke dalam rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, serta lokasi dan pendanaan indikatif. Selain itu, Renja Perangkat Daerah menjembatani rencana strategis ke rencana operasional ke dalam langkah kebijakan tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya target kinerja rencana strategis jangka menengah.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan mengingat berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, serta rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah berkenaan;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan; dan/atau
c. Adanya kebijakan Nasional dan Provinsi yang mewajibkan perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah untuk diakomodir dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah.

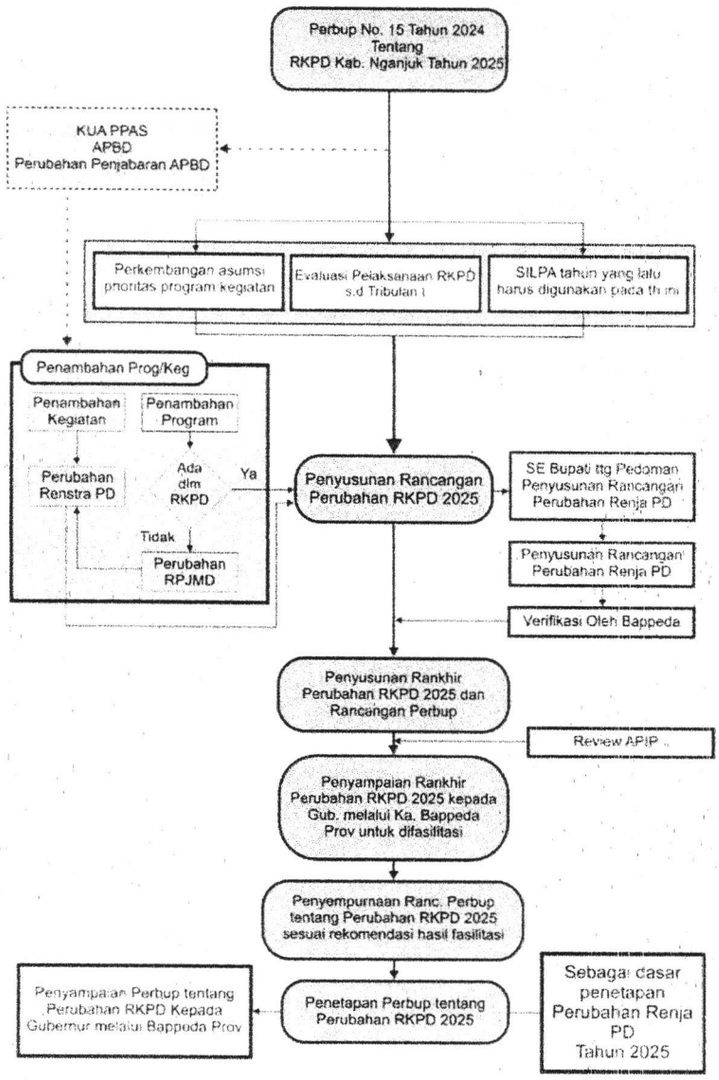
d. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, serta rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah berkenaan;

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 mempedomai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tahapan meliputi:

1. evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I;
2. penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025;
3. penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
4. penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025,

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Daerah, secara diagramatik diilustrasikan dalam gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1
Diagram Alir Perubahan Renja Perangkat Daerah



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD serta didasarkan pada pengendalian dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan I tahun berkenaan, pada akhirnya Perubahan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
12. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran. 2025;
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
24. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;
26. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penyesuaian rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah terhadap perkembangan keadaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

a. Menetapkan perubahan program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan I Tahun 2025;
b. Mengakomodir Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah pergeseran APBD yang ditetapkan dalam Perubahan Penjabaran APBD;
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025.
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bagi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, disajikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun Berkenaan;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD; dan
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
3.2. Program dan Kegiatan.
BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui capaian kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 beserta perubahannya, dan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 beserta perubahannya, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun Berkenaan

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 triwulan 1 dan perkiraan capaian tahun 2026 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2024, serta pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025
(Target Berdasarkan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026)

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=7	11=(10/4)
3				**Urusan Pemerintah Pilihan**									
3	**27**			**Urusan Pemerintah Bidang Pertanian**									
3	**27**	**01**		**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Indek Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah**	**82 Nilai**	**80,05**	**81,5**	**80,05**	**98,22%**	**82 Nilai**	**80,05**	**98,22%**
3	27	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	41 Dokumen	43 Dokumen	43 Dokumen	43 Dokumen	100%	41 Dokumen	43 Dokumen	100%
3	27	01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun	81 dokumen	81 Dokumen	81 Dokumen	81 Dokumen	100%	81 dokumen	81 Dokumen	100%
3	27	01	2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah dan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	-	1 Laporan	100%
3	27	01	2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	-	1 Laporan	100%
3	27	01	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum Perangkat Daerah	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%	7 dokumen	7 dokumen	100%
3	27	01	2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	121 unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit	100%	121 unit	17 Unit	100%
3	27	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	3 jenis	3 jenis	3 Jenis	3 jenis	100%	3 jenis	3 jenis	100%

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=7	11=(10/4)
3	27	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik perangkat daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	179 unit	168 Unit	168 Unit	168 Unit	100%	179 unit	168 Unit	100%
3	**27**	**02**		**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**Persentase Sarana yang digunakan**	**100 %**	**77,01%**	**100%**	**77,01%**	**77,01%**	**100 %**	**77,01%**	**77,01%**
3	27	02	2.01	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kelompok yang di awasi dan didampingi terkait penggunaan sarana pendukung pertanian	1.275 kelompok tani	1.275 kelompok tani	1.275 kelompok tani	1.275 kelompok tani	100%	1.275 kelompok tani	1.275 kelompok tani	100%
3	27	02	2.02	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan Sumber Daya Genetik tanaman berkualitas	3 kegiatan	3 kegiatan	3 komoditas	3 komoditas	100%	3 kegiatan	3 komoditas	100%
3	27	02	2.05	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah kanupaten/kota	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
3	**27**	**03**		**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Persentase Prasarana yang digunakan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
3	27	03	2.01	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah pembangunan, rhabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian	-	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	-	5 Laporan	100%
3	27	03	2.02	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian	1 unit	66 Unit	66 Unut	66 Unit	100%	1 unit	66 Unit	100%
3	**27**	**04**		**Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular**	**10 %**	**-56%**	**10%**	**-56%**	**560%**	**10 %**	**-56%**	**560%**
3	27	04	2.01	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah	Jumlah ternak yang ditangani	80.000 ekor	125.841 ekor	80.000 ekor	125.841 ekor	157,30%	80.000 ekor	125.841 ekor	157,30%

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=7	11=(10/4)
				Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota									
3	27	04	2.02	Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan dalam daerah	4 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	100%	4 laporan	8 laporan	100%
3	27	04	2.03	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medic veteriner	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
3	27	04	2.04	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah laporan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%
3	**27**	**05**		**Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana**	**100 %**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100 %**	**100%**	**100%**
3	27	05	2.01	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas lahan pertanian yang dilakukan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	1.250 ha	1.157 ha	1.157 ha	1.157 ha	100%	1.250 ha	1.157 ha	100%
3	**27**	**06**		**Program Perizinan Usaha Pertanian**	**Persentase pemberian rekomendasi Izin Usuha Pertanian**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
3	27	06	2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kebupaten/Kota	Jumlah rekomendasi usulan izin usaha yang diterbitkan	6 dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 dokumen	6 Dokumen	100%
3	27	06	2.02	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah usaha peternakan yang dilakukan pengawasan	60 usaha peternakan	50 usaha peternakan	50 usaha peternakan	50 usaha peternakan	10%	60 usaha peternakan	50 usaha peternakan	10%
3	**27**	**07**		**Program Penyuluhan Pertanian**	**Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya**	**1,10%**	**0,94%**	**0,94%**	**0,94%**	**100%**	**1,10%**	**0,04%**	**100%**

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=7	11=(10/4)
3	27	07	2.01	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pelatihan	25 kelompok tani	32 kelompok tani	32 kelompok tani	32 kelompok tani	100%	25 kelompok tani	32 kelompok tani	100%

Tabel 2.2
Data Sarana Pertanian

NO.	JENIS SARANA PERTANIAN YANG DIBERIKAN	JUMLAH	
		TAHUN 2024	TAHUN 2025 Triwulan I
1.	Pupuk	Urea : 33.233 ton NPK : 24.142 ton NPK Formula : 0,06 ton Pupuk Organik : 3.550,59 ton	Urea : - Kg NPK : - Kg NPK Formula : - Kg
2.	Kendaraan Bermotor Roda 3	5 unit	-
3.	Hand Traktor rotary	8 unit	-
4.	Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	7 unit	

Tabel 2.3
Data Prasarana Pertanian

NO.	JENIS PRASARANA PERTANIAN YANG DIBERIKAN	JUMLAH	
		TAHUN 2024	TAHUN 2025 Triwulan I
1.	Pembangunan Jalan Usaha tani	6 Unit	-
2.	Pembangunan BPP Jatikalen	1 Unit	-
3.	Pembangunan Sumur dalam	5 Unit	-
4.	Pembangunan Sumur dangkal	50 unit	
5.	Pembangunan sumur gali	7 Unit	-
6.	Pembangunan Dam Parit	2 unit	
	Jumlah	71 Unit	-

Tabel 2.4
Data Kejadian dan Kasus Penyakit Hewan Menular

NO.	JENIS PENYAKIT HEWAN	JUMLAH	
		TAHUN 2024	TAHUN 2025 Triwulan I
1.	Penyakit Hewan Menular	1.949 kasus	- kasus
2.	Penyakit Mulut dan Kuku	72 kasus	- kasus
	Jumlah	2.021 kasus	- kasus

Tabel 2.5
Data Kejadian Bencana Pertanian

NO.	JENIS BENCANA PERTANIAN	LUAS SERANGAN	
		TAHUN 2024	TAHUN 2025 Triwulan I
1.	WBC	420 Ha	270 Ha
2.	Tikus	433 Ha	20 Ha
3.	Penggerek Batang	140 Ha	10 Ha
4.	Ulat *Spodoptora*	60 Ha	10 Ha
5.	Hindola	22 Ha	60 Ha
6.	Blast	40 Ha	10 Ha
	Total	1.125 Ha	380 Ha

Tabel 2.6
Data Profil Usaha Pertanian

NO.	BIDANG USAHA PERTANIAN	JUMLAH USAHA		KETERANGAN
		TAHUN 2024	TAHUN 2025 Triwulan I	
1.	Hortikultura	18 pelaku usaha	18 pelaku usaha	Penangkar Benih Bawang Merah, Sayuran Semusim, Buah Tahunan, Biofarmaka, Pengedar Buah,
2.	Tanaman Pangan	25 pelaku usaha	25 pelaku usaha	Penangkar Benih Padi, Kedelai, jagung
3.	Peternakan	11 pelaku usaha	11 pelaku usaha	Rumah potong unggas, Sapi, Fattening Sapi, Bebek, Domba, Kambing
4.	Sarana Pertanian	156 pelaku usaha	156 pelaku usaha	Kios pupuk

Tabel 2.7
Data Profil Kelembagaan Pertanian

NO.	JENIS LEMBAGA PERTANIAN	JUMLAH LEMBAGA	
		TAHUN 2024	TAHUN 2025 Triwulan I
1.	Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)	282 kelompok	282 kelompok
2.	Kelompok Tani (Poktan)	1.345 kelompok	1.345 kelompok
3.	Kelompok Tani Wanita (KWT)	45 kelompok	45 kelompok

Tabel 2.8
Data Produksi Pertanian

NO.	KOMODITI	PRODUKSI	
		TAHUN 2024	TAHUN 2025 Triwulan I
1.	Tanaman Pangan :		
	1. Padi (ton)	512.421,84	151.115
	2. Jagung (ton)	236.791,11	37.888
	3. kedelai	7.628,93	250
2.	Tanaman Hortikultura :		
	1. Bawang merah (ton)	205.603,20	24.968
	2. Cabai Rawit (ton)	4.455,10	2.117
3.	Tanaman Perkebunan		
	1. Tebu (ton)	217.158,30	-
	2. Tembakau (ton)	2.171,00	-
4.	Hasil Peternakan		
	1. Daging (ton)	10.219,40	3.010
	2. Telur (ton)	8.260,20	2.029,7

Tabel 2.9
Data Nilai Tukar Petani (NTP)

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		TAHUN 2025	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatkan kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	102,5	111,96	103	-

Tabel 2.10
Data Persentase Peningkatan Produksi Pertanian dan Peternakan

NO.	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET		REALISASI	
			2024	2025	2024	2025
1.	Meningkatnya produksi pertanian dan peternakan	1. Persentase peningkatan produksi pertanian	0,175%	0,176%	3,13%	-
		2. Persentase Peningkatan Produksi peternakan	1,8%	1,9%	1,45%	-

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Data dan informasi realisasi kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sampai Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.11
Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Tujuan	Indikator	Target		Realisasi		Sasaran	Indikator	Target		Realisasi	
			2024	2025	2024	2025			2024	2025	2024	2025
1.	Meningkatkan kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	102,5	103	111,51	-	Meningkatnya produksi pertanian dan peternakan	Persentase peningkatan produksi pertanian	0,175%	0,176%	3,13%	-
								Persentase peningkatan produksi peternakan	1,8%	1,9%	1,45%	-

Analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dari tujuan Dinas Pertanian adalah sebagai berikut :

Tujuan Dinas Pertanian adalah meningkatnya kesejahteraan petani dengan indikator kinerja Nilai Tukar Petani (NTP). Target kinerja pada Tahun 2024 adalah 102,5 terealisasi 111,51 dengan capaian kinerja 108,79%. Predikat pencapaian NTP termasuk kategori Tercapai. Capaian nilai tukar petani (NTP) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur

daya beli petani terhadap barang dan jasa yang mereka butuhkan, yang dihitung berdasarkan perbandingan antara harga yang diterima oleh petani untuk hasil pertanian mereka dan harga yang harus mereka bayar untuk membeli barang dan jasa.

Nilai Tukar Petani dihitung dengan membandingkan indeks harga yang diterima petani (harga hasil pertanian yang dijual) dengan indeks harga yang dibayar petani untuk barang dan jasa (seperti kebutuhan produksi pertanian, pangan, dan barang lainnya).

Rumus perhitungan NTP adalah:

$$NTP = \frac{indeks\ harga\ yang\ diterima\ petani\ (IT)}{\text{indeks harga yang dibayar petani (IB)}}\ x\ 100\%$$

Keterangan:

It = Indeks Harga yang Diterima Petani (harga yang diterima petani atas hasil pertanian mereka).
Ib = Indeks Harga yang Dibayar Petani (harga barang dan jasa yang dibeli oleh petani untuk proses

Jika NTP lebih besar dari 100, maka daya beli petani meningkat, sedangkan jika NTP kurang dari 100, daya beli petani menurun. NTP lebih dari 100, maka petani mengalami surplus. Artinya, harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya.

Nilai Tukar Petani Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2024 adalah 111,51. Capaian Nilai Tukar Petani (NTP) lebih dari 100 menunjukkan bahwa daya beli petani terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan dalam proses produksi pertanian lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran yang mereka terima dari hasil jualan produk pertanian mereka. Dengan kata lain, NTP Kabupaten Nganjuk lebih dari 100 menunjukkan kondisi yang menguntungkan bagi petani karena mereka mendapatkan lebih banyak barang dan jasa untuk setiap satuan hasil pertanian yang mereka jual.

Analisis terhadap capaian NTP yang lebih dari 100 dapat melibatkan beberapa aspek, di antaranya: menandakan bahwa petani berada dalam posisi yang lebih baik secara ekonomi. Artinya, pendapatan yang diperoleh dari hasil pertanian mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi dan bahkan dapat memberikan surplus untuk kebutuhan lainnya. Ini bisa menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan di kalangan petani. Harga produk pertanian di pasaran lebih baik dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk memproduksi hasil pertanian tersebut.

Harga jual produk pertanian yang tinggi akan berkontribusi pada capaian NTP yang lebih dari 100. Kebijakan pemerintah seperti subsidi pupuk, subsidi bahan bakar, atau bantuan langsung tunai bisa menurunkan biaya produksi atau meningkatkan pendapatan petani. Adanya peningkatan hasil produksi, petani bisa memperoleh lebih banyak hasil dari jumlah input yang sama atau lebih sedikit, yang berujung pada NTP yang lebih tinggi.

Analisis terhadap pencapaian sasaran kinerja Dinas Pertanian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.12
Pencapaian Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Pertanian

No	Indikator	Jumlah Produksi		Persentase Peningkatan Produksi
		2023	2024	
1	Produksi pertanian			
	a. Tanaman Pangan			
	- Padi (ton)	484.378,37	512.421,85	0,058%
	- Jagung (ton)	189.719,34	236.791,11	0,185%
	- Kedelai (ton)	8.648,11	7.628,93	-0,118%
	b. Tanaman Hortikultura			
	- Bawang Merah (ton)	183.755,85	205.603,20	0,119%
	- Cabe Rawit (ton)	4.920,43	4.455,10	0,025%
	- Cabe Besar (ton)	539	223,80	0,414%
	c. Tanaman Perkebunan			
	- Tebu (ton)	218.567,30	217.158,30	-0,006%
	- Tembakau (ton)	1.332,68	2.171,00	0,629%
	Prosentase Peningkatan Produksi = (Produksi n – produksi (n-1)) x 100% / Produksi (n-1)			0,163%
	Capaian Prosentase Peningkatan Produksi Pertanian tahun 2024 dari target kinerja 0,175%			93,23%

Capaian kinerja peningkatan jumlah produksi pertanian pada Tahun 2024 secara umum mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2023. Untuk komoditi padi, jagung mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2023. Hal ini terjadi karena perubahan sistem cara budidaya tanaman yang semakin canggih, kebutuhan irigasi yang relatif cukup meskipun belum merata karena adanya pembangunan pompanisasi, perbaikan/rehabilitasi jaringan irigasi tersier meskipun belum maksimal, hama dan penyakit tanaman yang masih bisa dikendalikan, meningkatnya kesadaran petani tentang penggunaan bibit unggul/bersertifikat. Untuk komoditi kedelai pada Tahun 2024 ini mengalami penurunan produksi karena harga yang fluktuatif kurang menguntungkan sehingga petani kurang tertarik untuk menanam kedelai dan beralih menanam komoditi yang lain seperti tembakau. Bawang merah pada Tahun 2024 mengalami peningkatan produksi karena iklim yang

cocok untuk budidaya bawang merah, meskipun ada serangan OPT ulat, namun masih bisa dikendalikan. Produksi cabe rawit dan cabe besar pada Tahun 2024 mengalami penurunan karena adanya elnino di Kabupaten Nganjuk untuk wilayah yang biasanya menanam cabe, dibeberapa tempat mengalami gagal panen, disamping itu ada beberapa petani yang biasanya menanam cabe, karena adanya perhatian pemerintah terhadap budidaya Tembakau melalui dana DBHCHT, petani beralih menanam tembakau. Produksi tebu di Tahun 2024 menurun karena kebanyakan tebu rakyat ditanam di lahan hutan yang sebenarnya kurang cocok untuk pertumbuhan tebu karena kurang tercukupinya kebutuhan air irigasi apalagi adanya elnino di kabupaten Nganjuk menyebabkan musim kemarau yang cukup kering menyebabkan kebutuhan air untuk pertumbuhan tebu kurang terpenuhi. Untuk komoditi tembakau di Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2024 meningkat karena adanya jaminan harga di Tahun 2023 menyebabkan petani tertarik menanam tembakau dan juga lahan yang biasanya dibiarkan bero juga ditanami tembakau.

Tabel 2.13

Pencapaian Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Peternakan

No	Indikator	Jumlah Produksi		Persentase Peningkatan Produksi
		2023	2024	
1	Produksi Peternakan			
	- Daging (ton)	9.717,48	10.219,40	5,17%
	- Telur (ton)	8.452,20	8.260,20	-2,27%
	Prosentase Peningkatan Produksi = $\frac{\text{(Produksi n – produksi (n-1))}}{\text{Produksi (n-1)}} \times 100\%$			1,45%
	Capaian Prosentase Peningkatan Produksi Peternakan tahun 2024 dari target kinerja 1,8%			80,38%

Produksi hasil peternakan pada Tahun 2024 mengalami capaian 80,38%. Realisasi produksi peternakan utamanya daging jika dibandingkan dengan Tahun 2023 mengalami peningkatan. Permintaan daging meningkat dikarenakan banyaknya masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan seperti hajatan, disamping itu daya beli masyarakat yang meningkat karena kasus penyakit hewan sudah menurun sehingga masyarakat tidak takut lagi untuk mengkonsumsi daging. Untuk produksi telur di Tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 karena kebanyakan peternak mengurangi jumlah ternak unggasnya karena harga pakan yang tinggi. Selain itu, fluktuasi harga jual telur menjadi masalah lain bagi peternak karena tidak diimbangi dengan biaya produksi yang justru terus meningkat

Tabel 2.14
Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output Pelayanan
Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pertanian	Jumlah Sarana dan prasarana pertanian yang diberikan	Jumlah Sarana Pertanian yang diberikan 1. Pupuk = 60.926 Ton - Urea = 33.233 Ton - NPK = 24.142 Ton - NPK Formula = 0,06 Ton - Pupuk Organik = 3.550,59 Ton 1. Pengadaan Kendaraan bermotor Roda 3 = 5 Unit 2. Pengadaan handtraktor rotary 8 Unit 3. Pelaksanaan Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) 7 Kelompok Tani	- Data realisasi penyaluran pupuk bersubsidi th. 2024 - Data realisasi Kegiatan APBD Ta. 2024 - Data realisasi Kegiatan DBHCHT Ta. 2024 - Data Realisasi Kegiatan DAK Non Fisik TA 2024
			Jumlah Prasarana pertanian yang diberikan = 71 unit 1. Pembangunan Jalan Usaha tani 6 unit 2. Pembangunan BPP Jatikalen 1 Unit 3. Pembangunan sumur dalam 5 Unit 4. Pembangunan sumur dangkal 50 Unit 5. Pembangunan sumur gali 7 unit 6. Pembangunan Dam parit 2 unit	- Data realisasi Kegiatan APBD Ta. 2024 - Data realisasi Kegiatan DBHCHT Ta. 2024 - Data Realisasi Kegiatan DAK Fisik TA 2024
		Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian 1. = 23 rekomendasi (100%)	Data Rekomendasi izin usaha
		Persentase prasarana yang digunakan	$= \frac{\text{Jumlah sarana yang digunakan}}{\text{Jumlah sarana yang diberikan}} x\ 100\%$ $= \frac{71}{71} x 100\%$ = 100%	Data dari Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian
		Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di Kabupaten	$= \frac{\text{Jumlah usulan yang difasilitasi}}{\text{jumlah usulan usaha pertanian}} x\ 100\%$ $= \frac{23}{23} x 100\%$ = 100%	Data dari Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
		Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	$= \frac{\text{Jumlah area yang dapat ditanggulangi}}{\text{Luas area terkena bencana}} x\ 100\%$ $= \frac{1.125\ ha}{1.125\ ha} x 100\%$ = 100%	Data dari Bidang Perlindungan Pertanian

Keterangan : * Data realisasi Tahun 2024

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama *(core bussiness)* dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.15
Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome
Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Proyeksi Realisasi
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	Tahun 2025
1.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun							
	- Padi (kw/ha)	63,65	63,97	64,29	64,97			63,97
	- Jagung (kw/ha)	72,81	73,46	74,13	70,86			73,46
	- Kedelai (kw/ha)	20,72	20,80	20,89	20,40			20,80
2.	Persentase penurunan kejadian kasus dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	10%	10%	10%	-56,01%			10%

Capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) produktivitas pertanian per hektar per tahun pada tahun 2024 sebagaimana pada Tabel 2.8 diatas untuk komoditas padi mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini terjadi karena perubahan sistem cara budidaya tanaman yang semakin canggih, kebutuhan irigasi yang relatif cukup meskipun belum merata karena adanya pembangunan pompanisasi, perbaikan/rehabilitasi jaringan irigasi tersier meskipun belum maksimal, hama dan penyakit tanaman yang masih bisa dikendalikan, meningkatnya kesadaran petani tentang penggunaan bibit unggul/bersertifikat. Sedangkan untuk komoditas jagung dan kedelai produktivitasnya belum bisa mencapai target karena adanya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) kepinding tanah pada fase vegetatif pertumbuhan sehingga pada fase generatif tidak bisa maksimal.

Tabel 2.16
Pencapaian Indikator Kinerja
Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular

No	**Penyakit Hewan Menular**	**Jumlah Kasus**	
		2024	**2023**
1.	MCF	0	0
2.	ND	0	0
3.	Rabies	0	0
4.	BEF	553	452
5.	DGS	0	0
6.	Gumboro	0	0
7.	Penyakit Mulut dan Kuku	72	1.126
8.	Brucellosis	54	370
9.	SE	0	0

No	Penyakit Hewan Menular	Jumlah Kasus	
		2024	2023
10.	TBC	0	0
11.	Leptospirosis	0	0
12.	Surra	0	0
13.	Scabies	120	21
14.	Pneumonia	0	0
15.	Bronchitis P	0	0
16.	Ascariasis	1.062	451
17.	Distomatosis	0	0
18.	Lain-lain PHM	160	2174
Prosentase Penurunan Kasus = $\frac{\text{(Jumlah kasus (n-1) – Jumlah kasus n)}}{\text{Jumlah kasus (n-1)}} \times 100\%$		2.021	4.594
Capaian Prosentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Tahun 2024 dari target kinerja 10%			56,01%

Capaian kinerja persentase penurunan kejadian kasus penyakit hewan menular dengan target penurunan 10% terealisasi 56,01%. Hal ini terjadi karena pada tahun 2023 terdapat wabah penyakit hewan menular Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Lumpy Skin Disease (LSD) yang banyak menyerang hewan berkuku belah/genap seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dengan target penurunan 10%, Dinas Pertanian pada tahun 2024 mampu menurunkan hingga 56,01%. Capaian ini terjadi karena Dinas Pertanian berupaya menanggulangi penyebaran penyakit hewan dengan melakukan sosialisasi tentang penyakit hewan, pentingnya vaksinasi, pelayanan kesehatan hewan seperti pelayanan vaksinasi, pengobatan hewan ternak yang sakit, pemberian vitamin, pemeriksaan hewan ternak yang sakit serta edukasi menjaga kebersihan lingkungan kandang ternak.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis yang saat ini sedang banyak dibicarakan dan berupaya untuk dicarikan solusinya :

a. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana pertanian untuk mendukung pencapaian produktivitas;
b. Perlunya peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular strategis yang bersifat zoonosis maupun tidak;
c. Perlunya peningkatan pengendalian dan penangganan bencana pertanian;

d. Perlunya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagai berikut:

a. Kurangnya penerapan pupuk berimbang;
b. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian;
c. Kurangnya penggunaan benih bermutu dan bersertifikat;
d. Terbatasnya ketersediaan infrastruktur prasarana pertanian;
e. Kurang optimalnya pemanfaatan alat mesin ;
f. Berkembangnya penyakit hewan menular strategis baik yang bersifat zoonosis maupun tidak;
g. Belum optimalnya pelaksanaan gerakan pengendalian OPT;
h. Adanya ancaman bencana pertanian akibat perubahan iklim dan serangan OPT;
i. Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan petani.

Untuk pencapaian visi dan misi Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, telah dirumuskan tema pembangunan daerah dalam RKPD Kabupatan Nganjuk Tahun 2025, yaitu **"Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural".**

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu strategis dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri;
2. Mendorong Berkembangnya Sektor Strategis Usaha Mikro, Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Pariwisata;
3. Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan, Pendidikan Berkarakter;
4. Pengentasan Kemiskinan, Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian;
6. Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Dan Digitalisasi Pelayanan Publik;
7. Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Perubahan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk.

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.17
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	≥ 91%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk dan pencapaian Renstra s/d Tahun 2025 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.18

Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	98,22%	Sanggat Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Penggunaan aplikasi baru (Sukma-e Jatim) unsur prioritas perbaikan yaitu sarana dan prasarana, waktu penyelesaian dan kompetensi pelaksana	Terdapat resiko kurang tercapainya target kinerja	Memberi wawasan pentingnya mengisi aplikasi Sukma-e Jatim
Program Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja**	**Predikat**
Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	77,01%	Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Kesalahan input NIK pada e-RDKK penyaluran pupuk bersubsidi	Terdapat resiko kurang tercapainya target kinerja	Penyaluran pupuk sesuai musim tanam dan peningkatan pelaksanaan IB
Program Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja**	**Predikat**
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100%	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Keterlambatan pelaksanaan karena di pengaruhi musim dan penempatan anggaran Kas di Tribulan III	Terdapat resiko belum tercapainya target kinerja	Mempersiapkan kegiatan pembangunan prasarana pertanian
Program Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja**	**Predikat**
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	560%	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Terjadi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan wabah Lumpy Skin Disease (LSD)	Terdapat risiko tinggi terhadap pencapaian target kinerja	Pengadaan obat, vaksinasi dan pelayanan kesehatan hewan dan adanya tambahan dokter hewan (P3K)
Program Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja**	**Predikat**
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100%	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Ada serangan OPT yang mengganggu tanaman pertanian	Tercapainya target kinerja	Ada Gerakan pengendalian Hama Terpadu guna menekan populasi hama tanaman pertanian.

		Dilakukan fasilitasi pestisida untuk gerdal WBC serta pelayanan penyemprotan dengan drone sprayer
Program Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja**	**Predikat**
Program Perizinan Usaha Pertanian	100%	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Usulan izin usaha di Aplikasi OSS tidak mempertimbangkan rekomendasi teknis dari OPD terkait	Terdapat resiko kurang tercapainya target kinerja	Melayani usulan surat rekomendasi teknis dari pelaku usaha
Program Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja**	**Predikat**
Program Penyuluhan Pertanian	100%	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan petani dilakukan koordinasi dengan kelompok tani dan pelaksanaan kegiatan.	Terdapat risiko sangat rendah tercapainya target kinerja	Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan petani di 20 kecamatan

Sumber : Laporan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.19
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase sarana pertanian yang digunakan		
	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Jumlah kelompok yang diawasi dan didampingi terkait penggunaan sarana pendukung pertanian		
	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengadaan Hand Traktor Rotary : 1. Kelompok tani Batur Desa Sumberkepuh Kec. Tanjunganom 2. Kelompok tani Harapan Bahagia Desa Betet Kec. Ngronggot 3. Kelompok tani Margo Makmur Desa Bangle Kecamatan Lengkong 4. Kelompok tani Margo Mulyo II Desa Banjardowo Kecamat Lengkong 5. Kelompok tani Rukun Tani Desa Banjardowo Kecamat Lengkong 6. Kelompok tani Sidodadi Desa Pulowetan Kecamat Jatikalen 7. Kelompok tani Sinto Desa Juwet Kecamat Ngronggot Pengadaan kendaraan bermotor roda 3 (tiga) : 1. Kelompok tani Bulu Makmur Desa Pulowetan Kec. Jatikalen 2. Kelompok tani Karya Widodo Desa Warujayeng Kec. Tanjunganom 3. Kelompok tani Mekar Sari Desa Jatikalen Kec. Jatikalen 4. Kelompok tani Rukun Abadi Desa Ngluyu Kec. Ngluyu 5. Kelompok tani Rukun Makmur Desa Ngluyu Kec. Ngluyu 6. Kelompok tani Rukun Makmur I Desa Balonggebang Kec. Gondang 7. Kelompok tani Sumber Rejeki Desa Balonggebang Kec. Gondang 8. Kelompok tani Sumber Tani Desa Perning Kec. Jatikalen	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	17 laporan	DBHCHT

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		9. Kelompok tani Tulus Bakti Desa Kedongombo Kec. Tanjunganom 10. Kelompok tani Upadi Tani Desa Bajang Kec. Ngluyu			
2.	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**		**Persentase Prasarana pertanian yang digunakan**		
	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian		**Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian**		
	Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pembangunan Jalan Usaha Tani : 1. Kelompok Tani Harapan Jaya Ds. Sugihwaras Kec. Prambon 2. Kelompok Tani Kedung Mulyo Ds. Kedungmlaten Kec. Lengkong 3. Kelompok Tani Maju Rukun Ds. Jatipungur Kec. Lengkong 4. Kelompok Tani Mekar Tani Ds. Sumberkepuh Kec. Lengkong 5. Kelompok Tani Mentari Ds. Banjurdowo Kec. Lengkong 6. Kelompok Tani Ngudi Rahayu Ds. Bajang Kec. Ngluyu 7. Kelompok Tani Lestari Ds. Nglawak Kec. Prambon 8. Kelompok Tani Tani Makmur Ds. Gampeng Kec. Ngluyu	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	8 unit	DBHCHT
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Pembangunan Irigasi Tanah Dalam : 1. Kelompok tani Yoso Mulyo Ds. Kedungsoko Kec. Sukomoro	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi	1 unit	APBD

Sumber: Hasil Kajian Perangkat Daerah Tahun 2025

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah "Meningkatkan kesejahteraan petani", adapun sasaran yang akan dicapai adalah "Meningkatnya produksi pertanian dan peternakan", dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah	**Indikator Kinerja**	**Target Tahun 2025**
Meningkatkan kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	103
Sasaran Perangkat Daerah	**Indikator Kinerja**	**Target Tahun 2025**
Meningkatnya produksi pertanian dan peternakan	Prosentase peningkatan produksi pertanian	0,176%
	Prosentase Peningkatan Produksi peternakan	1,9%

3.2 Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Perubahan anggaran subkegiatan Dinas Pertanian tahun 2025 yaitu:

A. Penambahan anggaran dari DBHCHT tahun 2025
   1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Rp. 737.470.950,-
   2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Rp. 1.024.400.000,-
   3. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Rp. 526.777.000,-

B. Penambahan anggaran dari DAK Non Fisik th 2025
   1. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rp. 583.200.000,-

2. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Rp. 2.000.000.000,-
3. Penyediaan dan peningkatan kapasitas penyuluhan pertanian Rp. 800.000.000,-
4. Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota Rp. 1.070.145.000,-

C. Penambahan anggaran BOP Penyuluh Pertanian

1. Penyediaan dan peningkatan kapasitas penyuluhan pertanian Rp. 688.560.000,-

D. Efisiensi/pengurangan anggaran tahun 2025

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berkurang Rp. 12.284.800,- pagu subkegiatan menjadi Rp. 15.890.200,-
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD berkurang Rp. 1.026.000,- pagu subkegiatan menjadi Rp. 2.394.000,-
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berkurang Rp. 702.000,- pagu subkegiatan menjadi Rp. 1.008.000,-
4. Pelaksanaan penatasusahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD berkurang Rp. 2.844.000,- pagu subkegiatan menjadi Rp. 49.291.000,-
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD berkurang Rp. 1.259.000,- pagu subkegiatan menjadi Rp. 2.041.000,-
6. Penyediaan logistik berkurang Rp. 46.402.250,- pagu subkegiatan menjadi Rp. 177.863.400,-
7. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan berkurang Rp. 28.322.100,- pagu subkegiatan menjadi Rp. 18.497.850,-
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan berkurang Rp. 1.750.000,- pagu subkegiatan menjadi Rp. 11.950.000,-
9. Fasilitasi Kunjungan Tamu berkurang Rp. 6.400.000,- pagu subkegiatan menjadi Rp. 1.600.000,-
10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berkurang Rp. 237.554.000,- pagu subkegiatan menjadi Rp. 236.001.000,-

11. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian berkurang Rp. 32.200.000,- pagu sub kegiatan menjadi Rp. 105.700.000,-
12. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman berkurang Rp. 16.534.750,- pagu sub kegiatan menjadi Rp. 117289.950,-
13. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman berkurang Rp. 48.392.000,- pagu sub kegiatan menjadi Rp. 0,-
14. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman berkurang Rp. 64.358.000,- pagu sub kegiatan menjadi Rp. 297.135.000,-
15. Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian berkurang Rp. 12.645.000,- pagu sub kegiatan menjadi Rp. 9.756.000,-
16. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian berkurang Rp. 8.206.000,- pagu sub kegiatan menjadi Rp. 8.206.000,-
17. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian berkurang Rp. 5.010.000,- pagu subkegiatan menjadi Rp. 4.860.000,-
18. Pengendalian Oraganisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan berkurang Rp. 134.336.450,- pagu subkegiatan menjadi Rp. 223.148.150,-
19. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan berkurang Rp. 15.402.000,- pagu subkegiatan menjadi Rp. 13.520.500,-
20. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan berkurang Rp. 10.650.000,- pagu subkegiatan menjadi Rp. 39.350.000,-
21. Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/ Pakan Hortikultura, dan Perkebunan berkurang Rp. 23.450.000,- pagu subkegiatan menjadi Rp. 133.490.000,-
22. Penjaminan Peredaran Banih/Bibit Ternak berkurang Rp. 5.625.000,- pagu subkegiatan menjadi Rp. 92.759.300,-

23. Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyait hewan Menular berkurang Rp. 71.789.650,- pagu subkegiatan menjadi Rp. 2.200.000,-
24. Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota berkurang Rp. 198.101.150,- pagu subkegiatan menjadi Rp. 49.739.550,-
25. Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa berkurang Rp. 275.698.000,- pagu subkegiatan menjadi Rp. 113.804.000,-
26. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa berkurang Rp. 46.644.850,- pagu subkegiatan menjadi Rp. 46.810.150,-
27. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian berkurang Rp. 128,230,600,- pagu subkegiatan menjadi Rp. 8.209.500,-
28. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian berkurang Rp. 28,200,100,- pagu subkegiatan menjadi Rp. 28.124.900,-

E. Pengurangan dan penambahan anggaran

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor bertambah Rp. 142.553.550,-
2. Pengadaan Mebel bertambah Rp. 72.000.000,-
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya bertambah Rp. 822.850.000,-
4. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner bertambah Rp. 94.334.944,-
5. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman berkurang Rp. 77.360.000,-
6. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman bertambah Rp. 7.492.500,-
7. Pengendalian Oraganisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan bertambah Rp. 69.825.000,- untuk pengadaan insektisida montaf
8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor bertambah Rp. 7.500.000,- pergeseran anggaran untuk makan minum dari subkegiatan

pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa

9. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Rp. 7.500.000,- (digeser ke subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor)
10. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian penyediaan anggaran Rp. 122.820.000,- untuk pengadaan POTS dan PH meter
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan bertambah Rp. 10.000.000,- untuk biaya sewa iklan
12. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berkurang Rp. 1.330.195.162,-

F. Perubahan rincian dan perubahan target indikator

1. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman menggati rincian kegiatan
2. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian (9 unit)
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (218 orang)
4. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (0)
5. Fasilitasi Kunjungan Tamu (5 laporan)
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (201 unit)
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (150 laporan)
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (175 unit)
9. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (1 laporan)

Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DINAS PERTANIAN KAB. NGANJUK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERTANIAN							**41.625.553.886,00**	**37.504.641.698,00**	**43.986.375.530,00**	**2.360.821.644,00**							**48.359.488.900,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**41.625.553.886,00**	**37.504.641.698,00**	**43.986.375.530,00**	**2.360.821.644,00**							**48.359.488.900,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**41.625.553.886,00**	**37.504.641.698,00**	**43.986.375.530,00**	**2.360.821.644,00**							**48.359.488.900,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Dinas Pertanian**				**82 Nilai**	**80,5 Nilai**	**37.939.777.386,00**	**34.842.164.698,00**	**34.244.506.186,00**	**-1.870.288.486,00**							**36.069.488.900,00**	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*				41 Dokumen	41 Dokumen	38.305.000,00	33.305.000,00	19.292.200,00	-19.012.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Dinas Pertanian		66.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20 Dokumen	20 Dokumen	33.175.000,00	28.175.000,00	15.890.200,00	-17.284.800,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB RKPD 2026
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/(Berkurang) (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET SEBELUM	PAGU INDIKATIF (Rp) SESUDAH	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.420.000,00	3.420.000,00	2.394.000,00	-1.026.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9 Laporan	9 Laporan	1.710.000,00	1.710.000,00	1.008.000,00	-702.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			6.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun*				81 Dokumen	81 Dokumen	34.803.532.000,00	32.158.675.162,00	30.824.377.000,00	-3.979.155.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Dinas Pertanian		32.956.488.900,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				237 Orang/ bulan	237 Orang/ bulan	34.748.097.000,00	32.103.240.162,00	30.773.045.000,00	-3.975.052.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			32.872.488.900,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD				50 Dokumen	50 Dokumen	52.135.000,00	52.135.000,00	49.291.000,00	-2.844.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan Perikanan Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab Pertumbuhan Ekonomi inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			80.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0025	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.300.000,00	3.300.000,00	2.041.000,00	-1.259.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan P1 Kab Pertumbuhan Ekonomi inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			4.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang disusun*				1 laporan	0 laporan	1.975.000,00	0,00	0,00	-1.975.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab Pertumbuhan Ekonomi inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Dinas Pertanian		7.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0 Laporan	1.975.000,00	0,00	0,00	-1.975.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab Pertumbuhan Ekonomi inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			7.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				1 Dokumen	0 Dokumen	132.085.500,00	0,00	0,00	-132.085.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab Pertumbuhan Ekonomi inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Dinas Pertanian		180.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	0 Orang	132.085.500,00	0,00	0,00	-132.085.500,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab Pertumbuhan Ekonomi inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			180.000.000,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum - Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	1.122.823.730,00	928.659.480,00	845.491.930,00	-277.363.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Dinas Pertanian		770.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.997.685,00	14.997.685,00	14.997.685,00	0,00	Kab Nganjuk Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			16.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				14 Paket	24 Paket	269.471.195,00	208.321.185,00	350.874.745,00	81.403.550,00	Kab Nganjuk Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			160.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	235.531.750,00	224.265.650,00	185.363.400,00	-50.168.350,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			225.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	51.540.100,00	46.819.950,00	28.322.100,00	-23.618.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			47.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	13.700.000,00	13.700.000,00	21.950.000,00	8.250.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			22.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKSIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	6 Laporan	14.000.000,00	8.000.000,00	6.400.000,00	-7.600.000,00	Kab. Ngamuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			60.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	96 Laporan	503.185.000,00	473.565.000,00	237.564.000,00	-265.621.000,00	Kab. Ngamuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan*				121 unit	121 unit	100.500.000,00	78.500.000,00	148.500.000,00	48.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Dinas Pertanian		125.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				117 Unit	201 Unit	100.500.000,00	78.500.000,00	148.500.000,00	48.000.000,00	Kab. Ngamuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			125.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah jasa penunjang urusan pemeliharaan daerah yang tersedia*				3 jenis	3 jenis	958.662.000,00	958.662.000,00	958.662.000,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Dinas Pertanian		1.001.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan -	1 Laporan -	500.000,00	500.000,00	506.000,00	0,00	Kab. Ngamuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			1.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	205.282.000,00	205.282.000,00	205.282.000,00	0,00	Kab. Ngamuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			230.000.000,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	752.900.000,00	752.900.000,00	752.900.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kearifan lokal P1 Kab - Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			970.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	*Jumlah barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara*				179 unit	171 unit	781.892.156,00	625.353.056,00	1.448.213.056,00	666.320.900,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kearifan lokal P1 Kab - Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Dinas Pertanian		963.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	38.987.400,00	38.987.400,00	38.987.400,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kearifan lokal P1 Kab - Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				99 Unit	98 Unit	156.103.050,00	142.427.950,00	142.427.950,00	-13.675.100,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kearifan lokal P1 Kab - Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			195.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				67 Unit	65 Unit	74.201.706,00	83.747.706,00	83.747.706,00	9.546.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kearifan lokal P1 Kab - Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			20.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	15 Unit	512.600.000,00	260.200.000,00	1.183.050.000,00	670.450.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kearifan lokal P1 Kab - Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			700.000.000,00	DINAS PERTANIAN
2	3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase Peningkatan Populasi Unggas Persentase Aktifitas dalam Kondisi Baik Persendaan Petani yang Menggunakan Dikit Unggul Persentase Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia Persentase Ketersediaan Pupuk Terhadap Kebutuhan Pupuk				100 %	2,62 99 83 1 100 % 75 16 11 16	936.834.350,00	936.934.350,00	1.413.977.800,00	1.743.066.680,00							2.630.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Jumlah kelompok tani yang di awasi dan dibimbing terkait penggunaan sarana pendukung pertanian*				1225 kelompok tani	1469 kelompok tani	137.900.000,00	137.900.000,00	643.170.950,00	705.270.950,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Kelompok tani		1.230.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																		
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				-	17 Laporan	0,00	0,00	737.470.950,00	737.470.950,00	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Prdewasari Kab. Nganjuk, Ngronggot, Juwet Kab. Nganjuk, Ngronggot, Betet Kab. Nganjuk, Tanjunganom, Wanajaya Kab. Nganjuk, Tanjunganom, Kedungsoko Kab. Nganjuk, Tanjunganom, Sumberkesuh Kab. Nganjuk, Jatikalen, Jatikalen Kab. Nganjuk, Jatikalen, Pening Kab. Nganjuk, Lengkong, Berge Kab. Nganjuk, Lengkong, Banjardowo Kab. Nganjuk, Nglayu, Bagang Kab. Nganjuk, Nglayu, Nglayu Kab. Nganjuk, Gedalang Belonggabang	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			750.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				12 Laporan	12 Laporan	137.900.000,00	137.900.000,00	105.700.000,00	-32.200.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			480.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan pengelolaan Sumber Daya Genetik tanaman bertuadlas*				3 kegiatan	3 kegiatan	543.709.250,00	543.709.250,00	344.556.450,00	-199.152.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Kelompok tani		1.250.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.09.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				3 Dokumen	3 Dokumen	133.924.250,00	133.924.250,00	117.289.500,00	-16.634.750,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.09.0005	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	48.392.000,00	48.392.000,00	7.482.500,00	-40.909.500,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			600.000.000,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemanusan dan Kesetaraan SDG Tasikmalaya																		
			Jumlah SDG Ikneman yang dilakukan pelestarian dan pemanfaatan				3 Varietas Unggul Baru (VUB)	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	351.483.000,00	351.483.000,00	249.774.490,00	-141.710.590,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab - Pertumbuhan Ekonomi inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			500.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan.. Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota*				2 kegiatan	2 kegiatan	255.325.100,00	255.325.100,00	226.250.100,00	-29.075.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab - Pertumbuhan Ekonomi inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Peternak dan ternak		180.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan																		
			Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan				4 Laporan	4 Laporan	156.940.800,00	156.940.800,00	133.490.800,00	-23.450.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab - Pertumbuhan Ekonomi inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak																		
			Jumlah benih/bibit ternak yang beredar				12 Laporan	12 Laporan	98.384.300,00	98.384.300,00	92.759.300,00	-5.625.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab - Pertumbuhan Ekonomi inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			160.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3	3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik**				100 %	100 %	1.014.850.000,00	202.000.000,00	1.226.400.000,00	1.035.150.000,00							2.050.000.000,00	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Jumlah pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana pertanian*				6 Unit	1 Unit	1.014.850.000,00	202.000.000,00	1.226.400.000,00	211.550.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab - Pertumbuhan Ekonomi inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Kelompok tani		2.050.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	8 Unit	206.850.000,00	0,00	1.024.450.000,00	817.550.000,00	Kab. Nganjuk, Prambon, Sugihwaras Kab. Nganjuk, Prambon, Nglawak Kab. Nganjuk, Ngluyu, Bajang Kab. Nganjuk, Lengkong, Jatipanggih Kab. Nganjuk, Lengkong, Kedungrejoleh Kab. Nganjuk, Lengkong, Banjardowo Kab. Nganjuk, Sumberkepuh	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (DTT)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab - Pertumbuhan Ekonomi inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			1.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan saringan irigasi Usaha Tani																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah ginjalan input usaha tani yang difasilitasi				4 Unit	1 Unit	860.000.000,00	202.000.000,00	202.000.000,00	-808.000.000,00	Kab. Ngawi, Sukomoro, Kedunggalar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			1.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN
4	3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Prosentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan				10 %	10 %	411.069.700,00	362.730.460,00	988.326.844,00	1.148.930.300,00							1.660.000.000,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah ternak yang diimpor*				80000 Ekor	80000 Ekor	370.169.600,00	321.830.350,00	269.890.500,00	-100.278.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pemoangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Peternak dan ternak		410.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular																		
			Jumlah Daeran Terdampak Wabah yang Terkendali				4 Laporan	4 Laporan	99.269.650,00	73.969.650,00	71.789.650,00	-27.480.000,00	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pemoangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			160.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				4 Laporan	4 Laporan	270.899.950,00	247.840.700,00	198.101.150,00	-72.798.800,00	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pemoangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Dalam daerah*				4 Laporan	4 Laporan	24.624.000,00	24.624.000,00	24.624.000,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pemoangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Peternak dan pelaku usaha peternakan		70.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPHK)																		
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPHK				4 laporan	4 laporan	24.624.000,00	24.624.000,00	24.624.000,00	0,00	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pemoangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			70.000.000,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner*				1 Laporan	1 Laporan	8.921.500,00	8.921.500,00	686.456.444,00	677.534.944,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industr	UPTD Laboratorium peternakan dan peternak		1.059.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium				1 Laporan	1 Laporan	8.921.500,00	8.921.500,00	8.921.500,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industr			450.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				-	2 Laporan	0,00	0,00	677.534.944,00	677.534.944,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK:DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industr			600.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Jumlah laporan pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner*				2 laporan	2 laporan	7.354.600,00	7.354.600,00	7.354.600,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industr	Peternak dan ternak		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan																		
			Jumlah unit usaha produk bewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi				2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	7.354.600,00	7.354.600,00	7.354.600,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industr			30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
5	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase Penurunan Area yang Terserang Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)				100 %	12 %	444.303.100,00	436.407.100,00	420.843.650,00	800.686.900,00							1.245.000.000,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota					1250 Ha		444.303.100,00	436.407.100,00	420.843.650,00	23.458.450,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industr	Kelompok tani		1.245.000.000,00	DINAS PERTANIAN...
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultusa, dan Perkebunan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				1100 Ha	1325 Ha	365.396.600,00	357.464.600,00	367.973.150,00	2.362.550,00	Kab. Nganjuk Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			850.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				100 Ha	100 Ha	28.922.500,00	28.922.500,00	13.520.500,00	-15.402.000,00	Kab. Nganjuk Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				50 Ha	50 Ha	50.500.000,00	50.000.000,00	39.350.000,00	-10.650.000,00	Kab. Nganjuk Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			145.000.000,00	DINAS PERTANIAN
6.	3.27.06	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Prosentase Izin Usaha Pertanian yang Terfasilitasi Penerbitan NIB**				**100 %**	**100 %**	**96.097.260,00**	**49.683.000,00**	**22.822.000,00**	**108.902.760,00**							**205.000.000,00**	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah rekomendasi usulan izin usaha yang diterbitkan*				6 Dokumen	6 Dokumen	79.083.000,00	49.683.000,00	22.822.000,00	-56.261.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Pelaku usaha pertanian		155.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.06.2.01.0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian																		
			Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian				3 Dokumen	3 Dokumen	22.401.000,00	22.401.000,00	9.756.000,00	-12.645.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			75.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian																		
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				2 Dokumen	2 Dokumen	16.412.000,00	16.412.000,00	8.206.000,00	-8.206.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan, Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah usaha pertanian yang dibina dan diawasi				1 Laporan	1 Laporan	40.276.000,00	9.600.000,00	4.660.000,00	-35.410.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			40.600.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	*Jumlah usaha peternakan yang dilakukan pengawasan*				60 usaha peternakan	0 usaha peternakan	17.014.250,00	0,00	0,00	-17.014.250,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Pelaku usaha peternakan		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.06.2.02.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan																		
			Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi				1 Laporan	0 Laporan	8.514.250,00	0,00	0,00	-8.514.250,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			30.600.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.06.2.02.0005	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan																		
			Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi				4 Laporan	0 Laporan	8.500.000,00	0,00	0,00	-8.500.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			20.000.000,00	DINAS PERTANIAN
7	3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase kelembagaan petani yang meningkat Kapasitasnya**				**1,10 %**	**1,54 %**	**782.622.100,00**	**675.722.100,00**	**5.669.500.350,00**	**3.767.477.900,00**							**4.550.000.000,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pelatihan*				25 kelompok tani	25 kelompok tani	782.522.100,00	675.722.100,00	5.669.500.350,00	4.886.978.250,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Penyuluh pertanian dan kelompok tani		4.550.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				20 Unit	20 Unit	439.502.000,00	388.502.000,00	275.605.000,00	-163.804.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			570.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	BRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				20 Unit	27 Unit	93.465.000,00	93.465.000,00	565.921.050,00	472.456.050,00	Kab. Nganjuk Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI (BBHT TEMBAKAU (CHT)	Mewujudkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			500.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				20 Unit	64 Unit	136.440.100,00	136.440.100,00	241.050.600,00	104.610.500,00	Kab. Nganjuk Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mewujudkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi					20 Unit	0,00	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	Kab. Nganjuk Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Mewujudkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			2.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																		
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				154 Orang	151 Orang	113.125.000,00	58.325.000,00	1.516.684.900,00	1.403.559.900,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN	Mewujudkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			130.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0007	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya					3 Unit	0,00	0,00	1.070.145.000,00	1.070.145.000,00	Kab. Nganjuk, Rejoso, Sukorejo Kab. Nganjuk, Gondang, Pandean Kab. Nganjuk, Gondang, Ja'an	DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Mewujudkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 6 Prov - Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			1.100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
			JUMLAH						41.626.953.886,00	37.556.641.686,00	43.986.375.650,00	2.359.821.444,00							48.368.488.900,00	

Dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, berikut Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat yang mendukung pencapaian target Standar Pelayanan Minimal tahun 2025.

Untuk mendukung program dan kegiatan Perangkat Daerah, serta pelaksanaan urusan pemerintahan "Meningkatkan kesejahteraan petani" diberikan Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Khusus

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Sasaran Penerima Manfaat			Sumber Pendanaan
			Nama Objek	Jumlah	Rincian	
1.	**PROGRAM : PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**					
	Kegiatan : **Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**					
	Sub. Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Hibah Barang	Hand Tractor Rotary	7 unit	1. Kelompok tani Batur Desa Sumberkepuh Kec. Tanjunganom 2. Kelompok tani Harapan Bahagia Desa Betet Kec. Ngronggot 3. Kelompok tani Margo Makmur Desa Bangle Kecamatan Lengkong 4. Kelompok tani Margo Mulyo II Desa Banjardowo Kecamat Lengkong 5. Kelompok tani Rukun Tani Desa Banjardowo Kecamat Lengkong	DBHCHT

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Sasaran Penerima Manfaat			Sumber Pendanaan
			Nama Objek	Jumlah	Rincian	
					Desa Bajang Kec. Ngluyu	
2.	**PROGRAM : PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**					-
	Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pertanian					
	Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Hibah Uang	Pembangunan Jalan Usaha Tani	8 unit	1. Kelompok Tani Harapan Jaya Ds. Sugihwaras Kec. Prambon 2. Kelompok Tani Kedung Mulyo Ds. Kedungmlaten Kec. Lengkong 3. Kelompok Tani Maju Rukun Ds. Jatipungur Kec. Lengkong 4. Kelompok Tani Mekar Tani Ds. Sumberkepuh Kec. Lengkong 5. Kelompok Tani Mentari Ds. Banjurdowo Kec. Lengkong 6. Kelompok Tani Ngudi Rahayu Ds. Bajang Kec. Ngluyu 7. Kelompok Tani Lestari Ds. Nglawak Kec. Prambon 8. Kelompok Tani Tani Makmur Ds. Gampeng Kec. Ngluyu	DBHCHT
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Hibah Uang	Pembangunan Irigasi Tanah Dalam	1 Unit	1. Kelompok tani Yoso Mulyo Ds.	APBD

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Sasaran Penerima Manfaat			Sumber Pendanaan
			Nama Objek	Jumlah	Rincian	
					6. Kelompok tani Sidodadi Desa Pulowetan Kecamat Jatikalen 7. Kelompok tani Sinto Desa Juwet Kecamat Ngronggot	
		Hibah Barang	Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga)	10 unit	1. Kelompok tani Bulu Makmur Desa Pulowetan Kec. Jatikalen 2. Kelompok tani Karya Widodo Desa Warujayeng Kec. Tanjunganom 3. Kelompok tani Mekar Sari Desa Jatikalen Kec. Jatikalen 4. Kelompok tani Rukun Abadi Desa Ngluyu Kec. Ngluyu 5. Kelompok tani Rukun Makmur Desa Ngluyu Kec. Ngluyu 6. Kelompok tani Rukun Makmur I Desa Balonggebang Kec. Gondang 7. Kelompok tani Sumber Rejeki Desa Balonggebang Kec. Gondang 8. Kelompok tani Sumber Tani Desa Perning Kec. Jatikalen 9. Kelompok tani Tulus Bakti Desa Kedongombo Kec. Tanjunganom 10. Kelompok tani Upadi Tani	DBHCHT

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Sasaran Penerima Manfaat			Sumber Pendanaan
			Nama Objek	Jumlah	Rincian	
	Jaringan Irigasi Usaha Tani				Kedungsoko Kec. Sukomoro	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 diharapkan memperhatikan keselarasan dan konsistensi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 beserta perubahannya, sehingga target kinerja tahun 2025 dapat dicapai dengan optimal.

4.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai implementasi pelaksanaan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. Melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. Melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

c. Menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025; dan
3. Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.